

**Refleksi Historis Konversi STI ke UIN :**

*Implikasi Kebijakan Pemerintah di Perguruan Tinggi Islam*

Oleh: Suheri, M.Pd.I

Dosen Tetap di STAI At-Taqwa Bondowoso

**Abstrak**

*Kehadiran lembaga pendidikan Islam yang berawal dari Pesantren yang melahirkan Madrasah hingga kemudian dilanjutkan kehaliran Sekolah sebenarnya merupakan upaya untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan zaman yang kian berkembang. Namun sejak kehadiran Kolonial melumpuhkan bahkan merombak performa pendidikan Islam di Indonesia. Kehadiran Belanda dengan pendidikan umumnya menyebabkan pergeseran orientasi bangsa Indonesia dalam menjalani pendidikan yakni belajar sebagai sebuah ibadah karena didasari nilai ibadah akhirnya beralih belajar demi mendapatkan pekerjaan. Rentetan pergolakan politik menarik Pendidikan Islam dalam pusaran tarik ulur kepentingan tentang konstruksi pendidikan Islam di Indonesia. Bahkan eksistensinya dari kaca mata Undang-undang menjadi perdebatan yang baru usai. Termasuk format perguruan Tinggi yang diharapkan menjadi solutis atas kegelisahan intelektual yang terjadi dimasyarakat, dimana kehadiran lembaga non formal (pesantren) mengantarkan alumninya memiliki ruang gerak yang sempit dalam berkibrah. Sehingga kelahiran Institut dan Universitas Islam diharapkan menjadi solusi cerdas dalam menjawab perubahan zaman. Meskipun menyandang Status baru bukan berarti mereka terbebas dari persolan. Justru kehadiran status perguruan tinggi baru mendatangkan persoalan dan tantangan baru untuk disikapi dengan cerdas. Oleh karena itu, mengetahui secara historis genealogi kelahiran perguruan tinggi menjadi kajian yang menarik untuk dicermati.*

Kata kunci : Konversi Perguruan Tinggi, Periodeisasi , pemerintah,

**A. Latar Belakang**

Dalam tulisan ini kami akan mengawali dengan suatu perbincangan tentang konversi Perguruan Tinggi Islam, yakni IAIN (Institut Agama Islam Negeri) yang merupakan titik persimpangan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia. Karena fase tersebut merupakan cikal bakal kelahiran sebuah STAIN dan Universitas Islam yang kian marak. Hingga tahun 2000 sebagaimana disampaikan oleh Komaruddin diseluruh Indonesia terdapat 14 IAIN dan 33 STAIN serta hingga awal tahun 1998 terdapat 3 UIN yakni Yogyakarta, Jakarta dan Bandung. Data ini merupakan gambaran keberadaan peruguran tinggi pada awal-awal reformasi. karena perguruan Tinggi

## Suheri

Islam khususnya selama Orde Lama IAIN tidak mengalami perubahan berarti, baik dalam struktur keorganisasian maupun keilmuan. Disamping misi ideologis dengan memekarkan jumlah institusi dalam bilangan puluhan dengan penyebaran sampai pada tingkat kabupaten.

Namun Era Prof. Dede Rosyada yang berakhir tahun 2014 lalu kejutan terjadi, dengan kebijakan di Eranya penghapusan nama STAI agar segera memilih untuk mundur menjadi STI (Sekolah Tinggi Ilmu...tertentu) atau segera alih status untuk segera naik menjadi Institut menjadi tantangan berat bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia apakah memilih stagnan atau segera keluar dari “zona nyaman”. Termasuk dimoratoriumnya Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi problem tersendiri yang tidak terelakan.

Tulisan ini akan mendekati kilas balik fase awal perguruan Tinggi dari sebuah perguruan Tinggi Islam di Indonesia yang berbentuk Sekolah Tinggi Islam (STI). Namun, tidaklah mudah menempatkan perguruan Tinggi Islam (STAI, IAIN) untuk disejajarkan dengan Perguruan tinggi Umum (PTU) Karena lembaga ini berdiri memiliki riwayat tersendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Hidayat dan Prasetyo bahwa “Awalnya Perguruan Tinggi Islam (PTI) didirikan tidak untuk memenuhi memenuhi kebutuhan akademik saja, melainkan juga agama, ideologi dan bahkan politik”.

Pendirian IAIN (PTAIN) hanya merupakan kelanjutan dari pendidikan Islam tradisional; dalam konteks ketenagakerjaan hanya dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang dapat mengisi tugas-tugas di bidang keagamaan. Kini rumusan tujuan tersebut sudah berkembang dimaksudkan agar IAIN/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)- di samping dapat mengembangkan ilmu agama yang kajiannya sejajar dan bahkan terintegrasi dengan ilmu umum dapat pula menghasilkan alumni yang tidak hanya bisa

### Refleksi Historis Konversi STI ke UIN

memasuki pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas di bidang keagamaan, tetapi juga bidang-bidang non-keagamaan

Berdirinya Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik. Namun, disisi lain ia berdiri untuk kepentingan dakwah. Walaupun masih disangsikan apakah ia ilmu atau aktifitas keagamaan. Karakter yang demikian, sering membuat sistem pengelolaan IAIN serba salah, demi kepentingan agama dan ideologi. Sehingga ia dikelola oleh Departemen Agama (sekarang Kantor Kementerian Agama), bukan Departemen Pendidikan Nasional yang merupakan institusi yang berwenang mengelola seluruh pendidikan.

Sehingga keberadaan Perguruan Tinggi Islam masih banyak yang mempertanyakan, bahkan terus menggelayuti sehingga upaya untuk segera beralih ke Institut dianggap sebagai solusi sekaligus jawaban atas kesangsian tersebut. Karena beberapa tahun yang lalu menurut Hidayat dan Prastetyo menegaskan bahwa IAIN pernah “tidak diakui” pemerintah sebagai perguruan Tinggi. Hal itu tercermin dari sistem Penganggaran yang diambilkan dari sektor agama yang menyatu dengan Pesantren, Masjid, Majelis Ta’lim, haji dan sebagainya dan bukan lembaga pendidikan. Lebih ironis lagi, para lulusan dari Perguruan Tinggi ini (IAIN) meskipun secara keilmuan memiliki kompetensi, pernah tidak bisa diterima mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil di instansi-instansi di luar Kementerian Agama. Hingga akhirnya secara perlahan pengakuan atas legalitas formalnya diakui oleh pemerintah dan masyarakat.

Sejak itulah, perguruan Tinggi Islam terus mengalami perubahan (konversi) dari Sekolah Tinggi, berubah menjadi IAIN hingga Universitas Islam Negeri. Faktor sosiologis merupakan dinamika masyarakat terutama keinginan dan kecenderungan untuk semakin maju, meskipun tidak bias dipungkiri keberaannya dengan label status baru tidak bias dilepaskan dari masalah yang menyertainya. Munculnya problematika baru dan ekses yang tidak diharapkan turut menyita pikiran bagi perguruan tinggi dengan status barunya. Namun, konversi itu juga tidak saja dilihat dari konteks kelambagaan

## Suheri

internal Perguruan Tinggi, namun relasi-relasi eksternal sebuah perguruan Tinggi.

Oleh karena itu konversi yang dilakukan perguruan tinggi Islam baik IAIN maupun UIN tidak lepas dari dukungan dari luar, misalnya kebijakan pemerintah, alumni dari luar negeri yang memiliki peran signifikan, atau donatur yang turut mendukung mengembangkan dalam men-sponsori perubahan tersebut seperti *Islamic Development Bank-* (IDB) sebagai penyandang dana pembangunan kampus yang modern, *McGill University* melalui *Canadian International Development Agencis* (CIDA), *Leiden University* (INIS), *Universitas Al-Azhar* (Kairo), *King Saud University* (Riyadh), *Ohio University*, *Lembaga Indonesia Amerika* (LIA), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),

## B. Pembahasan

### 1. Sejarah Lahirnya perguruan Tinggi Islam (Periode Rintisan)

Cita-cita mendirikan lembaga pendidikan tinggi agama Islam sebenarnya telah lama dimiliki masyarakat Islam. Karenanya, sebelum PTAIN sebagai cikal bakal IAIN berdiri, usaha-usaha mengembangkan lembaga pendidikan Tinggi Islam telah dimulai. Di Jakarta misalnya, betapapun kurang berhasil karena intervensi Belanda, Dr. Satiman Wirjosanjojo mendirikan yayasan Pesantren Luhur sebagai pusat Pendidikan tinggi Islam.

Bahkan uniknya menurut Nurcholish Madjid mengatakan, seandainya negeri kita ini tidak dijajah tentulah Sistem pendidikan di Indonesia akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh pesantren. Sehingga Perguruan Tinggi tidak berupa UI, ITB, IPB, UGM, UNAIR melainkan bernama Universitas Tremas, Krapyak, Tebuireng, Bangkalan, Lasem sebagaimana pesantren Luhur tersebut.

Lima tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). STI hanya berjalan selama dua tahun (1940-1942)

### **Refleksi Historis Konversi STI ke UIN**

karena pendudukan Jepang. agaknya disatu sisi munculnya STI Jakarta merupakan upaya terakhir umat Islam mendirikan perguruan tinggi.

Akan tetapi, Umat Islam Indonesia tidak pernah berhenti menyuarkan pentingnya pendidikan tinggi Islam bagi kaum Muslim yang merupakan mayoritas pendudukan Indonesia. Pemerintah Jepang kemudian menjanjikan kepada umat Islam untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta. Janji Jepang itu direspon tokoh-tokoh muslim dengan membentuk yayasan, Muhammad Hatta sebagai ketua dan Muhammad Natsir sebagai sekretaris.

Pada 8 Juli 1945, yayasan tersebut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). STI berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. Beberapa tokoh Muslim lain ikut berjasa dalam proses pendirian dan pengembangan STI. Mereka antara lain Drs. Muhammad Hatta, KH. Wahid Hasyim, KH. Mas Mansur, KH. Fathurrahman Kafrawi, dan Farid Ma'ruf. Pada 1946, STI dipindahkan ke Yogyakarta mengikuti kepindahan ibukota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejalan dengan perkembangan STI yang semakin besar, pada 22 Maret 1948, nama STI diubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan penambahan fakultas-fakultas baru. Sampai dengan 1948, UII memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas ekonomi dan Fakultas Pendidikan.

Kebutuhan akan tenaga fungsional di Departemen Agama menjadi latar belakang penting berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Fakultas Agama UII dipisahkan dan ditransformasikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Perubahan ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 1950. hingga PTAIN ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 26 September 1951 dengan jurusan Da'wah (kelak Ushuluddin), Qodlo (kelak menjadi Syari'ah) dan Pendidikan (Tarbiyah). Dan dikukuhkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 1957.

## Suheri

Disamping itu dalam waktu yang hampir bersamaan pemerintah juga mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta ) pada 14 Agustus 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 dengan Mahmud Yunus sebagai Dekannya Bustani A. Gani sebagai wakil Dekan. ADIA dimaksudkan untuk mendidik dan Menyiapkan pegawai negeri dengan kemampuan akademis dan semi akademis tingkat diploma sebagai pengajar agama di Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP), Sekolah khusus dan sekolah agama. Disinilah Perguruan Tinggi Islam untuk pertama kali menyediakan diri bagi pemenuhan kebutuhan birokrasi. Sebelum akhirnya disatukan menjadi IAIN yang akan diterangkan pada pembahasan berikutnya

Dalam konsideran disebutkan bahwa PTAIN bertujuan memberikan pengajaran studi Islam tingkat tinggi dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam. Berdasarkan PP tersebut, hari jadi PTAIN ditetapkan pada 26 September 1950. PTAIN dipimpin KH. Muhammad Adnan dengan data jumlah mahasiswa per 1951 sebanyak 67 orang dengan tiga jurusan :

- a) Jurusan Tarbiyah
- b) Jurusan Qadla (Syari'ah)
- c) Jurusan Dakwah

Kita bisa melihat lebih jelas dasar pandangan dibalik pendirian Sekolah Tinggi Islam melalui Satiman dan Hatta yang merumuskan empat dasar, yaitu :

- a) Kesadaran bahwa Masyarakat islam tertinggal dalam pengembangan Pendidikan dibanding non-muslim
- b) Masyarakat non-muslim maju karena mengadopsi cara Barat dalam sistem Pendidikan mereka
- c) Perlunya menghubungkan sistem pendidikan islam dengan dunia internasional

### Refleksi Historis Konversi STI ke UIN

- d) Dalam pendidikan islam unsur lokal penting untuk diperhatikan sekolah Tinggi Islam.
- e)

## C. Konversi PTAIN dan ADIA menjadi IAIN

### 1. IAIN periode Orde Lama

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maka PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi IAIN "Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah" dengan pusat di Yogyakarta. IAIN ini diresmikan tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama K. H. Wahib Wahab. Sejak tanggal 1 Juli 1965 nama "IAIN Al-Jami'ah" di Yogyakarta diganti menjadi "IAIN Sunan Kalijaga", nama salah seorang tokoh terkenal penyebar agama Islam di Indonesia. Dan satu IAIN yang berpusat di Jakarta dengan nama IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN syarif Hidayatullah).

Hal ini mengakibatkan keinginan masyarakat di seluruh negeri untuk belajar agama islam tidak mampu tertampung. Sebagian masyarakat muslim di beberapa daerah meminta lembaga pendidikan tinggi islam negeri juga didirikan di daerah mereka. Kalaupun tidak mereka meminta fakultas penting juga dapat dibuka. akhirnya pada tahun 1960, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui TAP-nya merekomendasikan IAIN untuk dikembangkan di beberapa daerah, oleh karena itu hanya dalam waktu 3 tahun (yakni pada tahun 1963), IAIN yang sebelumnya hanya berpusat di Yogyakarta dan Jakarta, dikembangkan menjadi 18 Fakultas tersebar di seluruh negeri. Fakultas Tarbiyah didirikan di Jakarta, Yogyakarta, Malang, dan Banda Aceh, Fakultas Adab ada di Jakarta dan Yogyakarta, fakultas Ushuluddin di Yogyakarta dan Jakarta,

## Suheri

Fakultas Syari'ah di Yogyakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Palembang, Surabaya, Serang dan Ujung Pandang.

Dalam merespon perkembangan IAIN yang pesat, Departemen Agama (sekarang kantor Kementerian Agama) mengeluarkan keputusan penting No. 49 tahun 1963 tentang peningkatan IAIN Yogyakarta dan Jakarta dijadikan lembaga independen. Sejak itu, IAIN Yogyakarta disebut IAIN Sunan Kali Jaga dan IAIN Jakarta disebut IAIN Syarif Hidayatullah. Dengan membawahi fakultas-fakultas di beberapa daerah yang dilaksanakan pada tanggal 18 maret 1963 dalam sebuah upacara yang diselenggarakan Departemen Agama di Auditorium IAIN di Ciputat. Hal ini merupakan langkah awal dari sebuah perkembangan IAIN di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan mutu dan menampung permintaan masyarakat, cabang-cabang IAIN di beberapa tempat ditingkatkan menjadi IAIN yang terpisah dan mandiri yaitu IAIN ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 5 Oktober 1963, IAIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 22 Oktober 1964, IAIN Antasari di Kalimantan Selatan pada tanggal 22 November 1964, IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 6 Juli 1965, IAIN imam Alaudin Ujung Pandang pada tanggal 28 Oktober 1965, IAIN Imam Bonjol padang pada tanggal 21 November 1966, dan IAIN Sultan Taha Saefuddin Jambi pada tanggal 27 tahun 1967.

Dapat dikatakan bahwa selama Orde Lama IAIN tidak mengalami perubahan berarti, baik dalam struktur keorganisasian maupun keilmuan. Misi dakwah tetap diemban, disamping misi ideologis dengan memekarkan jumlah institusi dalam bilangan puluhan dengan penyebaran sampai pada tingkat kabupaten. Namun, *menjamurnya* Perguruan Tinggi salah satu upaya instrumen ideologis yang berfungsi sebagai tempat *memproduksi* ulama, disisi lain juga menjadi benteng pertahanan tradisi dari paham komunisme yang saat itu agresif



### Refleksi Historis Konversi STI ke UIN

disamping menginginkan pendidikan tinggi islam modern. Karena keinginan untuk mencetak ulama' yang intelek.

Berbeda dengan pondok pesantren yang hanya mencetak santri yang *tafaqqub fiddin* tanpa basis akademik Sebagaimana disampaikan oleh Satiman "waktu Indonesia masih tidur, *ondersijs* agama di Pesantren mencukupi keperluan umum, akan tetapi sesudahnya bangun dan merasakan jumlahnya buah dari bermacam-macam sekolahan, dan sekolah rendah sampai sekolah tinggi, masyarakat merasa tak puas lagi dengan buahnya pesantren. Sehingga tidak heran pada beberapa kalangan pesantren merasa tersaingi dengan keberadaan perguruan tinggi tersebut, walaupun pada akhirnya juga banyak orang-orang pesantren yang menimba ilmu di IAIN.

Hal terpenting untuk dipahami terhadap gejala munculnya perguruan Tinggi di IAIN yaitu orang-orang NU dengan kendaraan partai politik Masyumi mendominasi Departemen Agama menjadi faktor utama tersebarnya Perguruan Tinggi atau IAIN di seluruh tanah air, dengan merespon aspirasi masyarakat yang sangat menekankan aspek ideologis dalam mempertahankan tradisi mereka. Sehingga kebijakan DEPAG untuk menggandakan PTAIN di beberapa daerah menjadi sesuatu yang sangat mudah karena *public figur* menjadi pilihan utama dalam pemilihan pegawai di kantor Departemen Agama saat itu. Bahkan beberapa kelompok di kalangan Departemen agama tersebut termarginalkan.

## 2. IAIN periode Orde Baru (periode McGill)

Dengan naiknya pemerintahan Orde Baru dengan Soeharto sebagai Presiden RI mengganti ir. Soekarno, ada beberapa pola kebijakan bagi pendidikan islam di tanah air, pada masa awal Orde baru antara tahun 1967-1971 ini merupakan masa transisi. Pada masa ini, menteri Agama tidak mengeluarkan kebijakan tentang lembaga pendidikan tinggi agama. Departemen Agama hanya melanjutkan

## Suheri

kebijakan-kebijakan lama yaitu merespon aspirasi tokoh-tokoh islam di daerah dengan terus mengembangkan IAIN sebanyak-banyaknya.

Perkembangan ini bisa dilihat sampai pada tahun 1973 ada sekitar 112 IAIN yang tersebar di seluruh pelosok tanah air bahkan kota-kota kecil bahkan sampai ke desa-desa kultur kosmopolit yang hendak diciptakan para pendiri lembaga pendidikan ini berangsur-angsur pudar. sebagaimana disampaikan oleh Ali Munhanif dengan mengutip tulisan Prof. Dr. A. Mukti Ali. Akhirnya pada tahun 1970 tantangan ini dijawab seorang lulusan McGill, Mukti Ali yang secara sistematis berusaha mengembalikan IAIN ke cita-cita pendirian semula. dia pewaris semangat para pendiri sekolah Tinggi Islam yang baik. Diantara keputusan yang penting saat di diangkat menjadi Menteri Agama (1971-1978). Dengan memunculkan inisiatif perubahan ditingkat Departemen Agama yaitu dengan melepaskan diri dari kalangan tradisionalis yang sangat dominan yakni dengan merekrut kembali kelompok non-tradisionalis yang selama ini termarginalkan dan merekrut tenaga-tenaga yang pulang dari barat sebagai staf kementeriannya.

Akhirnya figur nomor satu di Depag bukan lagi datang dari pemimpin umat, melainkan teknokrat atau akademisi. Dan modernisasi lembaga pendidikan tinggi mulai dibangun. Diantara keputusan yang penting Mukti Ali menumbuhkan kembali budaya urban dengan menutup sebagian besar IAIN yang ada ditempat-tempat terpencil. Dengan keputusan yang dia keluarkan pada tahun 1975, dari 112 IAIN hanya 13 yang diberi izin beroperasi dan ke 13 IAIN itu berada dikota Propinsi. Kondisi ini memang diperlukan untuk mengurangi keberadaan IAIN yang terlalu *gemuk* untuk ukuran sumber daya manusia yang tidak melimpah. Puncak dari kegiatan rasionalisasi organisasi ini (menteri penerus Mukti Ali), ialah dilepasnya sekitar 40 fakultas cabang IAIN yang akhirnya menjadi 36 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) pada tahun 1997, di luar 14 IAIN yang ada.

### **Refleksi Historis Konversi STI ke UIN**

Dampak dari kebijakan tersebut berpengaruh besar pada perkembangan IAIN, disatu sisi membatasi mahasiswa yang akan masuk ke IAIN, tetapi di sisi lain mengurangi beban Departemen Agama. Dan dengan hanya mengizinkan IAIN-IAIN yang ada di kota provinsi untuk beroperasi, menumbuhkan kembali inklusifisme di IAIN lebih mudah, kehidupan kota yang lebih plural, problem masyarakat yang kompleks, serta kesediaan sarana yang lebih baik dibanding ditempat terpencil, berpengaruh besar terhadap perkembangan wawasan dan kepribadian mahasiswa.

Munculnya SKB tiga Menteri 24 Maret 1975 yang tersohor itu berusaha mengembalikan keterpurukan dan ketertinggalan pendidikan Tinggi Islam dari mainstream pendidikan nasional. Pada waktu itu telah diidentifikasi kelemahan-kelemahan diantaranya adalah kualitas pendidik yang rendah, sarana pendidikan yang kurang, dan lain-lain. Hal ini berarti Pendidikan tinggi Islam belum merupakan sebagai alternatif pendidikan modern. Tersingkirnya Pendidikan Tinggi Islam dari mainstream pendidikan nasional disebabkan karena adanya dualisme pengelolaan pendidikan yaitu Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, yang keduanya tidak seimbang dalam pengelolaannya. Dikotomi ini memperparah pengembangan pendidikan Islam termasuk Pendidikan Tinggi Islam dan memperpuruk pendidikan Islam dari arus perkembangan masyarakat sekitarnya. Keadaan ini membawa usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di dalam suatu dilema yang sulit.

Arah modernisasi ini terus bergulir ditangan menteri-menteri agama sesudah Mukti Ali.

Selain Mukti Ali Harun Nasution juga memiliki peran yang besar terhadap kajian di IAIN, walaupun pengaruh Mukti Ali tidak sebesar Harun Nasution. Namun usaha Mukti Ali memasukkan perbandingan agama sebagai salah satu bidang kajian utama di IAIN memberikan dampak yang signifikan bagi berkembangnya wacana dialog antar

## Suheri

agama di tanah air. Demikian juga Harun Nasution mempopulerkan gagasan teologi rasional *ala mu'tazilah*. Karena prihatin kecenderungan fanatik kelompok yang berlebihan.

Penggantinya, Alamsyah Ratu Perwiranegara, meneruskan kebijakan pembangunan program pasca sarjana, sehingga kehidupan akademik kampus semakin terasa. Termasuk metodologi ilmu-ilmu sosial juga mulai diperkenalkan dalam kajian-kajian agama. Pada saat Munawir Sadzali naik menggantikan Alamsyah, penguatan kelembagaan serta keilmuan IAIN semakin terasa. Status persamaan status lembaga ini dengan Perguruan Tinggi lain. Demikian pula peningkatalan kualitas tidak hanya dikirim ke Timur Tengah namun ke negara-negara barat. Demikian pula ketika Tarmidzi Taher menjadi Menteri Agama, semangat keilmuan di IAIN semakin meningkat dengan bergulirnya wacana tentang Universitas Islam Negeri (UIN).

Selain itu, berkembang pula keinginan untuk menempatkan IAIN dalam atap pengelolaan yang sama, yakni Depdiknas. Hal ini menyiratkan bahwa beban ideologis kalangan IAIN atau umat islam pada umumnya tidak lagi seberat masa-masa sebelumnya, dimana kecurigaan terhadap departemen lain tidak begitu tinggi.

### D. Konversi IAIN ke UIN (Era baru Pendidikan Tinggi fase reformasi)

Ketika Tarmidzi Taher menjabat menjadi menteri Kurikulum IAIN 1995 dinilai belum sepenuhnya mampu merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat yang semakin modern. Hal ini disebabkan karena kurikulum 1995 menunjukkan kakunya *kompartmentalisasi* (pengkotakan) sejak semester-semester awal serta terlalu banyaknya pencabangan ilmu sehingga beban yang dipikul peserta didik terlalu berat.<sup>7</sup> Di samping itu, dalam kurikulum 1995 belum ada keterpaduan antara program S1, S2 dan S3, sehingga terkadang muncul ketidakserasian antara program-program tersebut. Seperti terkesan selama ini, program S1 mengarah kepada spesialisasi, sementara program S2 dan S3 justru mengarah kepada

### **Refleksi Historis Konversi STI ke UIN**

kajian yang lebih bersifat general. Semua ini membawa kesulitan bagi pengelola dan dosen IAIN untuk mengembangkannya sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Menyadari perlunya revisi kurikulum secara periodik, maka pada 30 Juni 1997 Menteri Agama, H. Tarmizi Taher, telah meresmikan kurikulum nasional baru IAIN/STAIN. Peresmian kurikulum baru ini dimaksudkan untuk menyempurnakan kurikulum 1995 yang dinilai sudah kurang relevan dengan perkembangan dan pembangunan nasional yang cukup dinamis. Ada beberapa hal baru yang terdapat dalam kurikulum 1997 ini, terutama yang terpenting adalah dekompartementalisasi, penekanan pada penguasaan metodologi kajian Islam, bahasa Inggris, serta penekanan kurikulum lokal yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan. Dekompartementalisasi merupakan pemilihan jurusan kepada mahasiswa sejak awal semester hal ini mengacu pada kurikulum 1995. Munculnya kurikulum diperguruan Tinggi (1997) bertujuan menghilangkan penjurusan semacam ini. Disamping itu tahun 1997 juga dikembangkan 33 fakultas di beberapa daerah menjadi STAI termasuk STAIN jember.

Menurut kurikulum terakhir ini, pada tahun pertama dan kedua semua mahasiswa dari semua fakultas (Adab, Da'wah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin) harus mengkaji doktrin-doktrin dan peradaban Islam secara komprehensif, walaupun masih bersifat garis besar, yakni dengan pemberian mata kuliah komponen institut, yang masing-masing disebut mata kuliah umum (MKU) dan mata kuliah dasar keahlian (MKDK). MKU yang berjumlah 24 SKS itu terdiri atas mata kuliah Pancasila, Kewiraan, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Ilmu Alam Dasar (IAD), Ilmu Sosial Dasar (ISD) dan Ilmu Budaya Dasar (IBD), dan Metodologi Studi Islam. Sedangkan MKDK yang berjumlah 30 SKS itu terdiri atas mata kuliah Ushul Fiqh, Ulumul Hadits, Ulumul Quran, Ilmu Kalam, Ilmu Tasawuf, Filsafat Umum, Metode Penelitian, Fiqh, Hadits, Tafsir, serta Sejarah dan Peradaban Islam.

## Suheri

Baru pada tahun berikutnya diberikan spesialisasi dalam fakultas dan jurusan masing-masing, yakni dengan pemberian mata kuliah keahlian (MKK) yang berjumlah 33 SKS. MKK tersebut memberikan arah masing-masing jurusan/program studi secara jelas. Kalau dalam kurikulum lama beberapa fakultas tertentu, seperti Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah tidak banyak berbeda antara satu jurusan dengan jurusan lain, maka dalam kurikulum baru ini tampak sekali perbedaannya, meskipun sekaligus juga membawa dilema tersendiri. Tampaknya Kurikulum 1997 tetap mempertahankan adanya kurikulum nasional, sebanyak 60% (87 SKS), dan kurikulum lokal sebanyak 40% (57 SKS).

Sejak tahun 1997/1998 wacana perubahan IAIN ke UIN sudah mulai didengungkan. Dan Cita-cita panjang IAIN Sunan Kali Jaga dan IAIN Syarif Hidayatullah baru tercapai mengalami konversi menjadi UIN Sunan Kali Jaga (1951-2004) berubah berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 1/0/SKB/2004 Nomor:ND/B.V/I/Hk.00.1/04 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 januari 2004 bersama IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan turunnya KEPPRES pada tanggal 20 Mei 2002.

Menurut Nata, paling tidak ada lima alasan yang melatarbelakangi perlunya konversi IAIN menjadi UIN, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perubahan jenis pendidikan pada Madrasah Aliyah.

Jika masa lalu Madrasah Aliyah merupakan sekolah agama, maka sekarang Madrasah Aliyah sudah menjadi sekolah umum yang bernuansa agama. Dengan kata lain muatan pelajaran umum menjadi pelajaran ini. Karena hal ini juga mengikuti standar kelulusan mata pelajaran hanya tertentu pada mata pelajaran umum tersebut. di Madrasah ada jurusan Sosial, eksakta, Bahasa, IPA. Dan lulusan IAIN akan sulit masuk ke IAIN jika IAIN hanya menyediakan program ilmu-ilmu agama tanpa melakukan perubahan ke UIN.

2. Adanya dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum.

### Refleksi Historis Konversi STI ke UIN

Dengan cara merubah merubah IAIN dan UIN maka dikotomi ilmu tersebut akan hilang. Dalam perdebatan para ahli terdapat perdebatan di sekitar wacana islamisasi, spiritualisasi dan integrasi antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu-ilmu agama. Gagasan islamisasi ilmu pengetahuan antara lain diprakarsai oleh Isma'il Raji Al Faruqi dengan diikuti oleh Naquib al 'Attas bahkan kelihatannya cenderung mulai kehilangan sedikit momentumnya. Dengan memberikan mata kuliah pada fakultas-fakultas keagamaan, seperti Tarbiyah, Syari'ah, Ushuluddin dengan memberikan wawasan bidang ilmu umum. Sisi positif dalam hal ini yaitu ruang gerak lulusan atau sarjana ilmu agama semakin luas. Hal ini juga senada dengan semangat islamisasi ilmu pengetahuan yang dicetuskan oleh Al Faruqi sebagaimana dikutip oleh Ancok dan Suroso, yang menyatakan :

*“Kita menyaksikan kemuduran besar yang rata-rata menimpa umat, yaitu kecerobohan untuk begitu saja meniru kebudayaan-kebudayaan asing. Peniruan itu tidak akan dapat membawa kita mencapai tujuan di segala bidang. Malah telah menimbulkan deislamisasi terhadap lapisan atas masyarakat Muslim dan demoralisasi terhadap lapisan lainnya. Pandangan islam menjadi kabur karena pandangan-pandangan lain yang kita terima dari penakluk-penakluk kolonial. Pandangan asing ini tetap bertahan walaupun para penakluk itu telah tiada, bahkan telah berkembang menjadi lebih berbahaya setelah para penakluk tersebut pergi. Untuk beberapa generasi kaum muslimim tampaknya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruhnya”.*

## Suheri

### 3. Perluasan lapangan kerja bagi alumni

Perubahan ini akan memberikan peluang yang lebih luas kepada para lulusannya untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas bukan hanya di Instansi yang berada dibawah naungan kantor Kementerian Agama saja. Satu contoh, IAIN sejak tahun 70-an sebenarnya sudah terdapat jurusan Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Paedagogik, seringkali lulusan jurusan-jurusan umum dari IAIN tersebut belum diakui oleh masyarakat pada umumnya. Dan mereka kesulitan menggunakan ijazah mereka dari jurusan umum tersebut. karena sekalipun dari IAIN namun gelarnya tetap, Sarjana Agama (S. Ag)

### 4. Mencetak pemimpin dalam gerakan peradaban umat islam.

Memberikan peluang pada lulusannya untuk melakukan mobilitas vertikal, yakni kesempatan dan peran untuk memasuki medan gerak yang lebih luas. Serta tidak lagi menjadi golongan yang termarginalkan . baik dalam sektor ekonomi, Politik, sosial dan Ilmu Pengetahuan

### 5. Tuntutan zaman

Perubahan Menjadi UIN juga sejalan dengan tuntutan umat islam yang selain menghendaki adanya pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan berkualitas tinggi yang juga lebih menawarkan banyaknya pilihan. Hal ini untuk menjawab tuntutan di era Globalisasi yang lebih kompetitif.

Rencana perubahan IAIN menjadi Universitas, bukanlah tanpa masalah didalamnya terdapat sejumlah permasalahan baik yang bersifat legalitas formal, kelembagaan, filosofis, historis, psikologis dan bahkan politis. Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bahwa :

“setiap terjadi proses “Perubahan”, maka kekhawatiran dan kecemasan tidak bisa ditutup-tutupi. Sebelum Senat Institut menyetujui konversi IAIN ke UIN, kekhawatiran dan kecemasan tampak dalam sidang diskusi dan lebih-lebih di luar forum sidang Senat. Berbagai pertanyaan muncul ke permukaan: Bagaimana nasib Fakultas Adab, Dakwah, Syariah, Tarbiyah



dan Ushuluddin? Akankah fakultas-fakultas ini dipinggirkan dan dimarginalkan?”

Persoalan tersebut, merupakan sedikit gambaran kegelisahan dari pengelola dan warga IAIN sendiri sebelum melakukan konversi. Belum lagi membahas bagaimana struktur keilmuan, kurikulum dan silabinya, bagaimana pula pengembangan pola minat dan bakat antara umum dan Agama. Persoalan yang paling mendasar adalah keuangan yang menjadi kendala utama dari sisi pengelolaan. Tidak sedikit kampus yang telah menaikkan anggaran pendidikan dengan berbagai cara agar mampu menutup biaya operasional kampus. Apalagi nasib UIN yang masih berada di bawah naungan Kantor Kementerian agama.

#### **E. Kesimpulan**

Pendirian Perguruan Tinggi Islam, tidak lepas dari kesadaran umat Islam dalam memiliki sebuah lembaga pendidikan lanjutan dari pendidikan atas, yang berfungsi dalam mencetak kader-kader Islam yang intelek sekaligus *tafaqquh fiddin*. Walaupun keberadaan Perguruan Tinggi tersebut mengalami perubahan dan perkembangan dari bentuk Sekolah Tinggi Islam (STI) tahun 1940-1942, kemudian menyatu ke dalam Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 1948 hingga memisahkan diri secara independen dan mandiri menjadi STAIN tahun 1950, hingga berubah lagi pada tahun 1960 menjadi IAIN yang berbentuk IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan terakhir mengalami konversi lagi menjadi UIN Sunan Kali Jaga tahun 2004 dan UIN Syarif Hidayatullah tahun 2002.

Pada masa orde baru Perguruan Tinggi Islam mengalami perkembangan luar biasa hingga berdiri sampai ke kota-kota kecil dan pedesaan untuk menjangkau mahasiswa yang akan melanjutkan studi di perguruan tinggi, disamping untuk membentengi umat

## Suheri

islam dari paham-paham komunisme dan golongan dengan dukungan dari Departemen agama yang banyak didominasi kaum Nahdliyin. Dan mengalami *perampingan* (1975) pada saat Mukti Ali menjabat menjadi Menteri Agama dan diikuti oleh menteri-menteri setelahnya untuk mengeksekusi posisi IAIN.

Perkembangan perguruan Tinggi Islam terus mengalami pembenahan dan perkembangan, termasuk pembenahan kurikulum pada tahun 1995 dengan model *kompartmentalisasi* (pengkotakan) sejak semester-semester awal. Dan diperbarui pada tahun 1997 oleh Tarmizi Taher. namun, keinginan untuk terus maju dan berkembang dalam diri IAIN terus diperjuangkan hingga tercapai pada tahun 2002 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan UIN Sunan kali Jaga (2004). Dengan diikuti oleh maraknya IAIN-IAIN dan STAIN di berbagai daerah berikut berbagai problematika yang menggelutinya.

**Daftar Pustaka**

- Abuddin Nata, 2007, *Manajemen Pendidikan : mengatasi kelemahan pendidikan islam di Indonesia*, Jakarta, Penerbit : Kencana
- Ali Munhanif, 1998, “Prof. Dr. A. Mukti Ali:Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru”, Jakarta, Penerbit : INIES
- Azyumardi Azra, 2001, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta , Penerbit : Kalimah
- Dr. Djamaluddin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, 1994, *Psikologi Islami : Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, Yogyakarta, Penerbit : Pustaka Pelajar
- Fuad Jabali dan Jamhari, 2002, *LAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, Ciputat, Penerbit: Logos wacana Ilmu
- Hasan Asari, 2001, *Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia : Kasus LAIN dan perguruan Tinggi Islam*, dalam Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan islam di Indonesia*, Jakarta Penerbit : Grasindo
- Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo, 2000, *Problem & Prospek LAIN: Ontologi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta,Penerbit : DEPAG RI
- Nur Cholish Madjid, 1997, *Bilik-bilik Pesantren sebuah potret perjalanan*, Jakarta, Penerbit: Paramadina
- Prof. Dr. M. Amin Abdullah, 2006, *Islamic Studies: Di perguruan Tinggi pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta, Penerbit : Pustaka Pelajar